

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah *Audited* Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp12,000,000.00 atau sebesar 100.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp12,000,000.00. Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp12,000,000.00 atau mencapai 100.00 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp85,968,405,200.00 atau mencapai 97.45 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp88,220,599,105.00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp83,886,486,691.00 atau 97.48 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp2,081,918,509.00 atau 96.25 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12,000,000.00 dan Belanja sebesar Rp85,968,405,200.00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp85,956,405,200.00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)		Tahun Anggaran 2022 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)		Tahun Anggaran 2022 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja	88,220,599,105.00	85,968,405,200.00	85,640,380,146.00	82,350,445,094.00
Belanja Operasi	86,057,585,208.00	83,886,486,691.00	84,393,314,741.00	81,155,201,654.00
Belanja Pegawai	39,541,328,911.00	38,782,531,153.00	40,061,109,042.00	39,183,471,101.00
Belanja Barang dan Jasa	46,516,256,297.00	45,103,955,538.00	44,332,205,699.00	41,971,730,553.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal	2,163,013,897.00	2,081,918,509.00	1,247,065,405.00	1,195,243,440.00
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,998,145,597.00	1,919,869,609.00	1,046,222,405.00	995,183,440.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164,868,300.00	162,048,900.00	200,843,000.00	200,060,000.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(Defisit)-LRA	(88,208,599,105.00)	(85,956,405,200.00)	(85,628,380,146.00)	(82,338,445,094.00)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14,518,523,119.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp61,078,895.00, Aset Tetap sebesar Rp14,252,971,619.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp204,472,605.00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49,399,798.00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14,647,243,321.00.

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Lancar	61,078,895.00	273,198,559.00
Aset Tetap	14,252,971,619.00	15,276,132,588.00
Aset Lainnya	204,472,605.00	204,472,605.00
Jumlah Aset	14,518,523,119.00	15,753,803,752.00
Kewajiban Jangka Pendek	49,399,798.00	56,521,980.00
Jumlah Kewajiban	49,399,798.00	56,521,980.00
Ekuitas	14,469,123,321.00	15,697,281,772.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14,518,523,119.00	15,753,803,752.00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2023. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12,000,000.00, Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86,883,335,051.00, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp86,871,335,051.00).

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO	12,000,000.00	12,000,000.00
Bebans	86,883,335,051.00	83,894,363,246.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(86,871,335,051.00)	(83,882,363,246.00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Pos Luar Biasa	0.00	0.00
Surplus/(Defisit)-LO	(86,871,335,051.00)	(83,882,363,246.00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15,697,281,772.00, Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp86,871,335,051.00), RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85,956,405,200.00, RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp365,827,751.00), RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp101,417,740.00, Ekuitas Tahun Anggaran

2023 sebesar (Rp48,818,589.00), dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14,469,123,321.00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Ekuitas Awal	15,697,281,772.00	16,701,208,628.19
Surplus/(Defisit)-LO	(86,871,335,051.00)	(83,882,363,246.00)
RK PPKD	85,956,405,200.00	82,338,445,094.00
RA PPKD (Perolehan)	(365,827,751.00)	(431,131,500.00)
RA PPKD (Penyusutan)	101,417,740.00	413,267,958.33
Ekuitas	(48,818,589.00)	557,854,837.47
Ekuitas Akhir	14,469,123,321.00	15,697,281,772.00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.